Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Hukum: Workshop Interaktif dan Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum

Zuhrah*[1], Husnatul Mahmudah[2], Juhriati[3], Munir[4], Kasmar[5]
[1,2,3,4] Universitas Muhammadiyah Bima
[1,3,4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima
[2]Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima
*e-mail: khairunnisa@umbima.ac.id[1]

Abstract

This program aims to enhance understanding of legal concepts and rights among women by organizing interactive workshops and training sessions focused on key legal topics relevant to their lives. Through a participatory approach, participants will engage in discussions, case studies, and practical exercises to deepen their legal knowledge and develop practical skills in navigating the legal system. Expected outcomes include increased legal awareness, improved ability to access legal resources and services, and empowerment of women to advocate for their rights and address legal challenges effectively. Ultimately, this initiative aims to contribute to the advancement of gender equality and social justice by equipping women with the knowledge and skills needed to assert their rights and participate more actively in legal processes. By strengthening legal understanding among women, it is hoped that they can avoid exploitation, receive adequate legal protection, and engage in decision-making processes related to their lives. Therefore, these interactive workshops and training sessions are expected to serve as a significant initial step towards women's empowerment and the creation of a more inclusive and just society under the law.

***Keywords**: Women empowerment, legal literacy, access to legal resources*

Abstrak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep hukum dan hak-hak di kalangan perempuan dengan menyelenggarakan workshop interaktif dan sesi pelatihan yang difokuskan pada topik hukum utama yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui pendekatan partisipatif, peserta akan terlibat dalam diskusi, studi kasus, dan latihan praktis untuk memperdalam pengetahuan hukum mereka dan mengembangkan keterampilan praktis dalam menjelajahi sistem hukum. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran hukum, kemampuan yang ditingkatkan untuk mengakses sumber daya dan layanan hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengatasi tantangan hukum secara efektif. Inisiatif ini pada akhirnya bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan kesetaraan gender dan keadilan sosial dengan membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum. Dengan menguatkan pemahaman hukum di kalangan perempuan, diharapkan mereka dapat menghindari eksploitasi, mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, workshop interaktif dan pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam perjalanan menuju pemberdayaan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara hukum.

***Kata kunci**: Pemberdayaan perempuan, literasi hukum, akses terhadap sumber daya hukum*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu agenda utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan akses terhadap hak-hak dasar, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan

(Saimima et al., 2022). Salah satu faktor yang penting dalam mencapai pemberdayaan perempuan adalah pemahaman mereka tentang hukum dan sistem peradilan.

Dalam konteks global, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi sistematis dalam hal hak-hak hukum, termasuk hak kepemilikan tanah, hak waris, hak untuk bekerja, hak kesehatan reproduksi, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan. Keterbatasan akses perempuan terhadap pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka dan sistem peradilan dapat menghambat kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, mengambil keputusan yang tepat, dan memperjuangkan keadilan.

Kabupaten Bima, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses hak-hak hukum mereka dan memperoleh keadilan yang layak (Bangun, 2020). Oleh karena itu, workshop interaktif dan pelatihan tentang hukum untuk perempuan di Kabupaten Bima dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan hukum di kalangan perempuan (Krisnanto & Syaputri, 2020). Pengetahuan tentang hukum bukan hanya penting untuk melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga untuk memberdayakan mereka secara keseluruhan. Dengan memahami hak-hak mereka di bawah hukum, perempuan dapat lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang melibatkan konflik atau kekerasan, mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih besar (Rochaety, 2014).

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Meskipun memiliki keindahan alam yang memikat, Kabupaten Bima juga dihadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan, termasuk dalam bidang akses terhadap sistem hukum dan keadilan bagi perempuan. Secara sosial dan budaya, Kabupaten Bima masih diwarnai oleh norma-norma patriarkal yang dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengakses hak-hak mereka secara penuh. Tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan di Kabupaten Bima dalam konteks hukum meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum, rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak hukum, serta ketidakmampuan untuk mengakses sistem peradilan yang mahal dan kompleks (Ashsyarofi et al., n.d.). Hal ini sering kali mengakibatkan perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penindasan.

Workshop interaktif dan pelatihan tentang hukum untuk perempuan di Kabupaten Bima diinisiasi dengan tujuan utama untuk memberdayakan perempuan melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan hukum mereka. Dengan cara ini, perempuan di Kabupaten Bima diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks, mengambil keputusan yang tepat, dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Workshop ini juga dianggap sebagai platform yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan dukungan antara perempuan, serta untuk membangun jaringan dukungan yang kokoh di tingkat local (Avessina et al., 2018). Selain itu, workshop ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat Kabupaten Bima, dengan mendorong kesetaraan gender dan akses yang lebih adil terhadap keadilan.

Sehingga dari workshop ini perempuan-perempuan di Desa Belo kabupaten Bima akan menjadi lebih sadar akan hak-hak hukum mereka, serta lebih siap untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak tersebut, dapat memberikan perempuan rasa percaya diri dan kemandirian dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks,. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, workshop ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perempuan di Kabupaten Bima, serta untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan.

2. METODE

Dalam menyelenggarakan workshop interaktif dan pelatihan tentang hukum untuk perempuan di Kabupaten Bima, pendekatan yang holistik dan partisipatif diterapkan. Workshop dimulai dengan tahap persiapan, di mana tujuan, sasaran, dan tema workshop diidentifikasi dengan jelas. Saat pembukaan workshop, tujuan acara diperkenalkan kepada peserta, yang diikuti oleh sesi presentasi materi oleh narasumber. Setelah itu, peserta terlibat dalam diskusi dan interaksi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik-topik tertentu terkait hukum dan gender. Studi kasus dan simulasi peran digunakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Sesi latihan keterampilan praktis memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan pengetahuan hukum mereka dalam situasi kehidupan nyata, seperti menulis surat atau mengisi formulir hukum. Selama workshop, juga dibentuk jaringan dukungan antara peserta, yang mendorong pertukaran informasi dan dukungan di antara mereka. Pada akhirnya, workshop dievaluasi untuk mengevaluasi keberhasilannya dan untuk menentukan perbaikan di masa mendatang. Peserta juga diberikan informasi tentang sumber daya tambahan dan dukungan lanjutan yang tersedia setelah workshop selesai, serta kemungkinan partisipasi dalam kegiatan berkelanjutan. Dengan demikian, workshop ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan hukum kepada perempuan di Kabupaten Bima, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam mencapai kesetaraan gender dan akses yang lebih adil terhadap keadilan di komunitas mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan secara rinci mengenai implementasi metode pengabdian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam melakukan kegiatan pengabdian untuk perempuan desa belo Kabupaten Bima. Workshop dimulai dengan sesi pembukaan dan pengantar, di mana tujuan dan manfaat dari workshop dijelaskan kepada peserta. Para peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya pemahaman hukum bagi perempuan dan bagaimana workshop ini dapat membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sesi ini melibatkan presentasi materi oleh narasumber yang ahli di bidang hukum dan gender. Materi yang disampaikan mencakup berbagai topik hukum yang relevan bagi perempuan, seperti hak-hak hukum dasar, proses hukum, dan sumber daya hukum yang tersedia. Presentasi dilengkapi dengan contoh kasus nyata dan strategi praktis untuk menghadapi masalah hukum.



Gambar 1. Proses kegiatan penyuluhan hukum

Setelah sesi presentasi, peserta diajak untuk terlibat dalam diskusi dan interaksi kelompok kecil. Mereka diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan pertanyaan mereka terkait dengan materi yang telah disampaikan. Diskusi ini dipandu oleh fasilitator yang memastikan semua peserta dapat berpartisipasi secara aktif.



Gambar 2. Proses Praktik Pelatihan

Sesi ini melibatkan studi kasus dan simulasi peran, di mana peserta diberikan kasus-kasus nyata tentang situasi hukum yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diminta untuk memecahkan masalah-masalah ini secara bersama-sama dan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan hukum yang telah mereka pelajari. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan latihan keterampilan praktis, seperti menulis surat resmi, mengisi formulir hukum, atau berkomunikasi dengan pengacara. Mereka mendapatkan umpan balik dari fasilitator dan sesama peserta untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan hukum mereka. Workshop juga menyediakan waktu untuk pembentukan jaringan dukungan antara peserta. Peserta diajak untuk saling bertukar informasi dan kontak, serta memberikan dukungan satu sama lain dalam memperjuangkan hak-hak mereka di bawah hukum. Setelah workshop selesai, dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mendapatkan umpan balik dari peserta. Selanjutnya, disusun rencana tindak lanjut untuk memastikan bahwa manfaat dari workshop ini dapat dipertahankan dan diperluas dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan praktis perempuan melalui workshop interaktif dan pelatihan. Melalui pendekatan partisipatif, program ini berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akses perempuan terhadap sumber daya hukum, dan memberdayakan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif (Ardhanariswari et al., 2023).

Workshop interaktif dan sesi pelatihan diarahkan untuk menyediakan platform di mana perempuan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum. Diskusi, studi kasus, dan latihan praktis digunakan untuk membantu mereka memahami konsep hukum secara lebih mendalam dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum, diharapkan perempuan dapat mengenali hak-hak mereka, menghindari eksploitasi, dan merespons dengan lebih efektif terhadap situasi hukum yang kompleks (Widuri, 2008).

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat akses perempuan terhadap sumber daya hukum. Dengan menyediakan informasi, bantuan, dan dukungan yang diperlukan, perempuan dapat lebih mudah mengakses layanan hukum dan sumber daya hukum lainnya. Ini termasuk akses terhadap bantuan hukum, dokumen hukum, dan

informasi tentang hak-hak mereka. Dengan demikian, mereka dapat lebih percaya diri dan mampu mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan kepentingan mereka .

Selain itu, melalui program ini, perempuan diberdayakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Dengan memahami hak-hak mereka dan memiliki keterampilan praktis dalam menjelajahi sistem hukum, mereka dapat lebih berani dalam berbicara dan bertindak untuk melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Ini akan membantu dalam memperkuat peran mereka dalam masyarakat dan mempromosikan kesetaraan gender secara lebih luas.

Secara keseluruhan, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender melalui peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan praktis mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bunda-Bunda Aisyiyah Kabupaten Bima yang bersedia mengikuti kegiatan workshop.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhanariswari, R., Dwi Cahyani, E., Dyah Amalia, S., Murniati, T., & Dharmawan, A. R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(2), 346–355. Https://Doi.Org/10.30656/Ps2pm.V5i2.7532

Ashsyarofi, H. L., Navisa, F. D., & Kaimuddin, A. (N.D.). *Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Hukum Melalui Sekolah Pemberdayaan*.

Avessina, M. J., Kustari, S. A., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Penyuluhan. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *2*(3). Https://Doi.Org/10.32832/Abdidos.V2i3.189

Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 74–82. Https://Doi.Org/10.15294/Pandecta.V15i1.23895

Fitrah, M., Jannah, M., & Khairunnisa. (2024). *Pengembangan Karya Pkm Dosen Melalui Workshop Penulisan Artikel Ilmiah*. *3*(1).

Fitrah, M., Lorosae, T. A., & Ramadhan, S. (2023). *Penguatan Integrasi Kurikulum Program Studi Dengan Dunia Kerja Melalui Studi Excursion Dalam Pembelajaran Mahasiswa*.

Jannah, M., & Wardini, A. (2023). *Pelatihan Desain Grafis Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Di Sman 1 Belo*.

Khairunnisa, Munir, & Gufran. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Dan Uu Ite: Sistematik Literatur Review. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *11*(2), 119–136. Https://Doi.Org/10.34304/Jf.V11i2.67

Khairunnisa, Zuhrah, & Mahmudah, H. (2024). *Tingkatkan Literasi Digital: Pelatihan Penggunaan Internet Ibu- Ibu Aisyiyah Kabupaten Bima*. *3*(1).

Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(2), 519. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V20i2.924

Rochaety, N. (2014). *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. *7*.

Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(1), 75–84. Https://Doi.Org/10.22219/Jdh.V2i1.19544

Widuri, E. (2008). *Pendidikan Hukum Perempuan*. *2*.